

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan proses penyusunan kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua komponen manajerial secara berjenjang, dengan tujuan memanfaatkan sumber daya -sumber daya yang ada, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Pemerintah Daerah (Renja SKPD) yang menyangkut program **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kelahiran/ Total Fertility Rate (TFR) dan menurunkan angka prevalensi kesetaraan dalam ber KB pasangan usia subur (PUS) di Kota Bima. Upaya tersebut hendak dilakukan *secara berjenjang* dalam bentuk *beberapa kegiatan prioritas*, antara lain :

1. Sosialisasi kebijakan dan program kependudukan
2. Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3. Penguatan sumberdaya penyelenggara program KB
4. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)
5. Peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra KS dan KS I
6. Pembinaan ketahanan keluarga
7. Peningkatan advokasi kepada stakeholder
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB
9. Pengembangan media komunikasi
10. Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemerintah daerah
11. Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM dan masyarakat
12. Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB
13. Peningkatan kualitas analisis data dan informasi manajemen program kependudukan dan KB

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kondisi dan permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan dan keluarga berencana di awal tahun 2018 ini antara lain :

1. Stagnansi TFR ini disebabkan angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) yang masih rendah dan jangkauan layanan KB yang belum menjangkau secara merata.
  - Pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terlayani (*unmet need*), juga tinggi, yaitu untuk nasional sebesar 8,5 persen (hanya mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dari tahun 2007 ke 2017); bahkan di Kota Bima masih 9,62 %.
  - Faktor lain yang mempengaruhi angka kelahiran adalah usia kawin pertama (UKP) bagi wanita, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kelahiran di usia remaja. Hasil SDKI 2016, UKP adalah 20,1 tahun.
  - Pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi) program KB belum optimal
  - Jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah; dan lemahnya pembinaan untuk upaya pelestarian akseptor KB;

## **Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima**

Terwujudnya generasi berkualitas melalui keluarga kecil bahagia sejahtera.

### **MISI.**

1. Meningkatkan Ketahanan Keluarga.
2. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.
3. Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Keluarga Berencana Berbasis Data Mikro

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima merupakan suatu proses penyusunan rencana secara bottom up melalui tahapan dan siklus. Tahapan penyusunan Renja DPP dan KB Kota Bima 2019 adalah :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM



## 2 . Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188)
5. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) , dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Untuk uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan , uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.
10. Peraturan Kepala BKKBN No. 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat jenis pelayanan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan advokasi dan KIE KRR;

11. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
12. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
13. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota:
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bima:
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima.
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 197);
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 386).

### **3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja DPP dan KB 2019.**

#### **3.1 Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja:**

- a. Himpunan usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Bima di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. Sebagai informasi tentang kebutuhan Dinas PP dan KB dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2019;
- c. Sebagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja perencanaan pada Dinas PP dan KB Kota Bima.

### **3.2 Tujuan disusunnya Rencana Kerja**

untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Kota Bima Tahun 2019.

## **4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana kerja Dinas PP dan KB Kota Bima 2018 sbb :

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu

BAB III Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

BAB IV Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang berdasarkan pencapaian, (Bidang Keluarga Berencana, Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan KB, Bidang KS)

BAB. V Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB.VI Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

BAB VII Penutup

Daftar Lampiran

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Realisasi program kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
<b>A. PROGRAM PELAYANAN</b>					
<b>ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.318.000,00	27.317.000,00	1.000,00	99,99
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.060.000,00	57.200.826,00	8.859.174,00	86,59
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.050.000,00	21.890.700,00	5.159.300,00	80,93
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.780.000,00	51.780.000,00	0,00	100,00
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.810.000,00	13.803.000,00	7.000,00	99,95
6.	Penyediaan alat tulis kantor	31.902.500,00	31.901.900,00	600,00	100,00
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.840.000,00	25.515.000,00	1.325.000,00	95,06
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.105.000,00	2.102.000,00	3.000,00	99,86
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	3.490.000,00	110.000,00	96,94
11.	Penyediaan makanan dan minuman	18.660.000,00	14.884.000,00	3.776.000,00	79,76
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.334.000,00	219.574.340,00	7.759.660,00	96,59
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.585.000,00	9.510.000,00	75.000,00	99,22
<b>C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					



1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	663.970.000,00	639.082.000,00	24.888.000,00	96,25
2.	Pengadaan mebeluer	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.349.000,00	12.349.000,00	0,00	100,00
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97.628.000,00	94.320.950,00	3.307.050,00	96,61
5.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	23.265.000,00	23.265.000,00	0,00	100,00
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	100,00
<b>C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>					
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
<b>D. PROGRAM PENINGKATAN KPASITAS SDM APARATUR</b>					
1.	Pelaksanaan Penilaian AKJG	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	100,00
<b>E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>					
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.760.000,00	21.760.000,00	0,00	100,00
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	100,00
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	100,00
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.120.000,00	40.120.000,00	0,00	100,00
5.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	100,00
<b>F. PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>					
1.	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga	91.970.000,00	90.220.000,00	1.750.000,00	98,10

	Miskin				
2.	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	119.425.000,00	119.425.000,00	0	100,00
3.	Pembinaan Keluarga Berencana	51.270.000,00	51.270.000,00	0	100,00
4.	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana	26.215.000,00	25.760.520,00	454.480,00	98,27
<b>G. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>					
1.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	100,00
2.	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	91.874.600,00	91.162.500,00	712.100,00	99,22
<b>H. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI</b>					
1.	Pelayanan konseling KB	546.375.000,00	495.398.900,00	50.976.100,00	90,66
2.	Pengadaan alat kontrasepsi	201.053.000,00	200.089.000,00	964.000,00	99,52
<b>I. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI</b>					
1.	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	54.819.500,00	51.331.000,00	3.488.500,00	93,64
2.	Orientasi Kader Pendataan Keluarga	43.858.000,00	41.127.000,00	2.731.000,00	93,77
3.	Operasional Kader pendataan keluarga	45.960.000,00	44.880.000,00	1.080.000,00	97,65
4.	Monitoring kegiatan pendataan keluarga	15.060.000,00	10.260.000,00	4.800.000,00	68,13
	Koordinasi pengelolaan program	34.517.500,00	26.707.000,00	7.810.500,00	77,37
<b>J. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR</b>					
1.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	15.872.500,00	15.872.500,00	0,00	100,00
2.	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	100,00
<b>K. PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS</b>					

1.	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	11.010.000,00	11.010.000,00	0,00	100,00
<b>L. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK</b>					
1.	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	29.280.000,00	29.280.000,00	0,00	100,00
<b>M. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA</b>					
1.	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	21.070.000,00	21.070.000,00	0	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.330.529.813,67</b>	<b>6.173.354.600,00</b>	<b>157.175.213,67</b>	<b>97,52</b>

## 2.1 Capaian Evaluasi Program dan Kegiatan dalam DPA 2017

URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN				
	INPUT		OUTPUT		OUTCOME/BENEFIT/IMPACT (%)
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					
Penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	12	bulan	100,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	12	bulan	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	54	Unit	54	Unit	100,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	12	bulan	100,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	bulan	12	bulan	100,00
Penyediaan alat tulis kantor	12	bulan	12	bulan	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	12	bulan	100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Tahun	1	Tahun	100,00
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	12	bulan	12	Bulan	100,00

URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN		
	INPUT	OUTPUT	OUTCOME/B ENEFIT/IMPACT (%)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 Bulan	100,00
Penyediaan makanan dan minuman	12 Kali	12 Kali	100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	15 Kali	12 Kali	100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah			
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Paket DAU/DAK	2 Pkt	100,00
Pengadaan mebelair	1 Paket	1 Pkt	100,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 Tahun	1 tahun	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 tahun	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	1 Pkt	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PARATUR</b>			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (Pakaian Keki. Pakaian Linmas )	65 Stel	65 Stel	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			
Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	2 Semester	2 Semester	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Doc	2 Dok	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5 Dok	5 Dok	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok	100,00
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD	3 Dok.	3 Dok.	100,00
Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Lap.	3 Lap.	100,00
<b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>			
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	70 Porsen	70 Porsen	100,00
Rapat Kerja daerah Program Keluarga berencana	2 Keg	2 Keg	100,00
Rapat Penelaahan Program (Review) Program KB			
<b>PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>			

<b>Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</b>	1 Keg.	1 Kegiatan	100,00
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	1 Keg.	1 Kegiatan	100,00
<b>PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarasutamaan Gender dan Anak</b>			
Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	1 Keg.	1 Kegiatan	100,00
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A	1 Keg.	1 Keg.	100,00
Pengembangan Kota sebagai sebagai Kota Layak Anak (KLA)	3 Keg.	3 Keg.	100,00
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	7 Keg.	7 Kegiatan	100,00
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	1 Keg.	1 Kegiatan	100,00
<b>PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI</b>			
Pelayanan Konseling KB	1 Keg.	1 Kegiatan	100,00
Pengadaan / Penyediaan Sarana Pelayanan KB	2 Paket DAK	2 Paket DAK	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	1 Keg.	1 Kegiatan	100,00
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1 Keg.	1 Kegiatan	100,00
Pembinaan dan Lomba kecamatan sayang ibu (KSI) dan rumah sakit sayang ibu (RSSI)	1 Kec./ RSSI	1 Kec./ RSSI	100,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI</b>			
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	220 kader	220 kader	100,00
Orientasi Kader Pendataan Keluarga	3 Keg/ 4 Angk	3 Keg/ 4 Angk	100,00
Operasional Kader Pendataan Keluarga	220 kader	220 kader	100,00
Monitoring Kegiatan Pendataan Keluarga	4 Kali 5 Kec	4 Kali 5 Kec	100,00
Koordinasi Pengelolaan Program	1 Kali	1 Kali	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>			
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	2 Keg. 40 org	2 Keg. 40 org	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS</b>			
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS	1 Keg.	1 Keg	100,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK</b>			

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	2 Keg.	2 Keg	100,00
<b>PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA</b>			
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	1 Keg.	1 Keg	100,00

**2.2. Capaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019.**

➤ **Capaian Target SPM Program Keluarga Berencana adalah**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	<b>2.61%</b>	2,36 %	109,58
<b>MENINGKATKAN PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevelance rate/mCPR)	<b>61.27%</b>	50,31%	82,11
	3	Persentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	<b>25.30%</b>	13,28%	147,51
	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	<b>6.27%</b>	8,86%	58,69
	5	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	<b>85 %</b>	86,63%	101,17 %
	6	Persentase Peserta KB aktif MKJP	<b>51.15%</b>	50,13%	98,01
	7	Jumlah peserta KB aktif tambahan	<b>2.74%</b>	11,12%	405,84
	<b>MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	8	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	45%	32%

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran.**

1. Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi dan layanan KB khususnya bagi keluarga miskin;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi dengan semua stakeholder;
3. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi dan kualitas perencanaan dan pelaporan;
4. Terbinanya kelompok kegiatan yang ada seperti BKB, BKR dan BKL
5. Terbinanya akseptor KB aktif dan tercapainya target capaian akseptor KB baru;
6. Tersedianya data mikro keluarga untuk kebutuhan perencanaan

#### **3.2. Program dan kegiatan.**

Dari uraian tujuan, sasaran Program dan Kegiatan DPP-KB tersebut diatas dapat dilihat lampiran 1 ( **terlampir** ).

**BAB IV**  
**INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG BERDASARKAN**  
**PENCAPAIAN KERJA**

Indikator kinerja, kuantitas capaian yang direncanakan untuk dicapai tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kelompok sasaran	Target Kuantitas Capaian	
		2018	2019
1	2	3	4
1. Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR) per WUS	Wanita Usia Subur	2,40%	2,21%
2. Porsentase pemakaian kotrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate (mCPR)	Pasangan Usia Subur	56,14%	51,54%
3. Porsentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kotrasepsi	Pasangan Usia Subur peserta KB	25,00%	24,97%
4. Porsentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Pasangan Usia Subur	9,10%	12,19%
5. Porsentase Peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pasangan Usia Subur	28,46%	32,87
6. Jumlah peserta KB aktif tambahan	Pasangan Usia Subur	17,55%	20,22
7. Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun	Remaja	43	40
8. Porsentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS	Pasangan Usia Subur	6,29%	5,70
9. Median usia kawin pertama wanita	Wanita Remaja	20,4%	20,2
10. Porsentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan	Pasangan Usia Subur	53,80	69,40
11. Porsentase pengetahuan PUS tentang alat/cara kotrasepsi	Pasangan Usia Subur	49,80	55,30



**BAB V**  
**DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU**  
**BERDASARKAN PAGU INDIKATIF**

Uraian Program dan Kegiatan Dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif DPP-KB Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 2 ( **terlampir** )

**BAB VI**  
**SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran 3 ( **terlampir** ).

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja DPP dan KB Kota tahun 2018 telah tersusun, dimana di dalam rencana tersebut telah tertuang berbagai program dan kegiatan yang diselaraskan dengan visi, misi DPP dan KB Kota Bima yang tentu saja telah diselaraskan dengan visi dan misi Walikota untuk Tahun 2019. Rencana Kerja DPP dan KB diharapkan menjadi bagian strategis dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2019 untuk mengantarkan pemerintahan Kota Bima ke arah Good Governace.

Raba-Bima, Mei 2018  
Kepala DPP – KB

**Drs. Suriadi, M.Pd**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19620602 198803 1 016